

Analisis Jalur Moderasi Dengan Pendekatan Multigrup Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dampak Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Pemediasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Pemoderasi Upah Minimum Provinsi

Titania Tintan El Syifa¹, Faishah¹, Syiffa Salwa Mawaddah¹

Universitas Brawijaya¹
titaniatintan@student.ub.ac.id

Abstrak— Urgensi pembangunan sumber daya manusia memenangkan persaingan global ditengah konsekuensi persaingan yang tidak pasti. Pengaruh pengembangan sumber daya manusia memiliki hubungan yang erat dengan pengeluaran negara dimana memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam segi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan yang konsisten karena bergantung dengan kondisi demografi yang ada. Kondisi demografi dipengaruhi oleh upah minimum provinsi yang mana akan memberikan dampak pada proses pengembangan sumber daya yaitu penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Upah Minimum sebagai variabel moderasi. Selain itu, juga untuk menganalisis variabel moderasi, yaitu Upah Minimum Provinsi yang terdiri dari dua grup yaitu Upah Minimum Provinsi Rendah dan Upah Minimum Provinsi Tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur moderasi pendekatan multigrup. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sedangkan Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada dua grup. Pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sedangkan pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi berpengaruh signifikan. Hubungan antara Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja dapat dikatakan bahwa Upah Minimum Provinsi menjadi moderasi yang memperkuat variabel-variabel tersebut. Namun, Upah Minimum Provinsi tidak dapat memoderasi hubungan antar variabel Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Kata kunci: *Analisis Jalur, Moderasi, Multigrup, Variabel Mediasi, Pertumbuhan Ekonomi Daerah*

I. PENDAHULUAN

Statistika adalah ilmu dengan pembelajaran mengenai kumpulan, analisis, dan penyajian data. Ilmu statistika bekerja berdasarkan data sehingga perannya tidak dapat terpisahkan dengan data. Data yang diolah dengan baik mampu menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan suatu lembaga. Sesuai dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan rekomendasi bagi objek penelitian yang dikaji. Objek penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah keputusan dan kebijakan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi. Metode analisis statistika yang dapat digunakan adalah persamaan multigrup menggunakan analisis jalur merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan bandingan antar dua kelompok, dimana dilakukan analisis sebanyak dua kali dan dilakukan perbandingan koefisien model pada kedua kelompok. Analisis yang dapat menyelesaikan pemodelan persamaan multigrup adalah analisis jalur yang merupakan teknik dalam analisis multivariat. Analisis jalur adalah metode yang termasuk dalam analisis kelompok hubungan antar variabel dan merupakan pengembangan analisis regresi. Analisis jalur adalah perpanjangan dari regresi linier berganda yang memungkinkan analisis model yang lebih kompleks [1]. Analisis jalur berguna untuk menguji konsistensi data dalam memberi hipotesis hubungan kausal antar variabel. Perbandingan multikelompok dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai kendala, kendala

pada topologi, koefisien jalur, varians residual, dan banyak lagi. Sampai saat ini, hanya analisis jalur klasik dan pemodelan persamaan struktural yang dapat menjelaskan perbedaan antar kelompok [2].

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang berat dalam segala aspek baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Pasca Covid-19, aspek-aspek kehidupan mulai beradaptasi dan menstabilkan keberlangsungan yang ada, utamanya perekonomian negara. Namun, dalam prosesnya Indonesia terancam mengalami resesi karena perekonomian yang tidak stabil. Ancaman resesi global pasca pandemi menunjukkan aksi nyata hasil dari pengaruh pertumbuhan ekonomi. Peringatan dini akan munculnya resesi global menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia. Isu ini diperkuat ketika banyak institusi finansial dunia seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) ikut mendengungkan isu ini [3]. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan akan terjadi resesi di dunia pada tahun 2023. Meskipun banyak ekonom yang mengatakan Indonesia jauh dari kata resesi, bukan berarti resesi global tidak akan memberi dampak kepada Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu waspada terhadap potensi risiko resesi yang akan mengancam perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memacu pembangunan ekonomi sebagai kekuatan untuk memperbaiki perekonomian negara. Jika dilihat dari pemerataan pembangunan manusia di level wilayah, masih terjadi ketimpangan capaian kualitas pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia. Dalam suatu perekonomian, mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dengan output bukan menjadi satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi memberikan arahan terkait sejauh mana kegiatan perekonomian pada masa tersebut berada. Berdasarkan data dari [4] mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pada tahun 2019 cenderung stabil tetapi pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mulai melemah. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga mencapai -3,49%. Tahun 2021 pasca pandemi, mulai terjadi kenaikan dan mulai stabil kembali hingga mencapai 7,07%.

Meningkatnya perekonomian dari tahun ke tahun bukan menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Indikator terpenting terdapat dalam faktor komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus membaik. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Jika dikaitkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di KBI dan KTI, diharapkan mampu berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja dan meratakan pembagian pendapatan daerah yang berada dalam satu wilayah. [5] Dalam teori ekonomi makro dari sisi pengeluaran dengan menaikkan nilai investasi akan menambah modal dan meningkatkan produktivitas dimana dalam prosesnya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan terjadi penyerapan tenaga kerja sehingga dapat membuat perekonomian Indonesia berkembang dengan baik. Pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang tidak konsisten, bergantung pada kondisi di suatu daerah tersebut [2]. Belanja pemerintah terklarifikasi dalam bentuk belanja menurut fungsi yaitu meliputi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran). Dengan demikian, dibutuhkan efisiensi pengeluaran publik pada sektor sosial serta tata kelola yang baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan berdampak membantu dalam meningkatkan besarnya pembangunan manusia [6]. Dari kebijakan tersebut alokasi belanja daerah dalam penetapan upah minimum juga menjadi pertimbangan yang penting mengingat perbedaan regional yang luas baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pembangunan manusia.

Pada penelitian sebelumnya mengenai pertumbuhan ekonomi daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Suryanto & Siregar pada tahun 2020 tentang Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Pengolahan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi [7]. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Intan & Safrianto pada tahun 2022, menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh [8]. Lalu pada tahun 2022 diteliti oleh Safitri disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh [9]. Penelitian yang dilakukan Mudiarcana & Marhaeni juga melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi [10].

Dari penelitian dilakukan oleh penulis sebelumnya, belum ada penelitian yang memfokuskan pada variabel moderasi yaitu Upah Minimum Provinsi. Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis multigrup pada variabel moderasi. Dimana variabel moderasi pada penelitian ini Upah Minimum Provinsi dibagi menjadi dua grup yaitu Upah Minimum Provinsi Rendah dan Upah Minimum Provinsi Tinggi. Pembentukan dua grup diharapkan mampu mengetahui perbedaan hubungan-hubungan variabel pada penelitian ini pada provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi yang rendah dan tinggi.

Untuk itu, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel mediasi dan upah minimum provinsi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur moderasi multigrup. Pendekatan moderasi multigrup agar diketahui pengaruh hubungan variabel eksogen dan variabel endogen semakin kuat atau semakin lemah akibat adanya variabel moderasi yaitu Upah Minimum Provinsi. Pada penelitian ini pendekatan *multigrup analysis* dengan variabel moderasi berupa *metric moderation* yaitu data sampel yang dibagi ke dalam grup berdasarkan tinggi rendahnya Upah Minimum Provinsi di wilayah tersebut. Analisis jalur ini merupakan pengembangan yang digunakan untuk menguji pengaruh hubungan sebab akibat apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja.

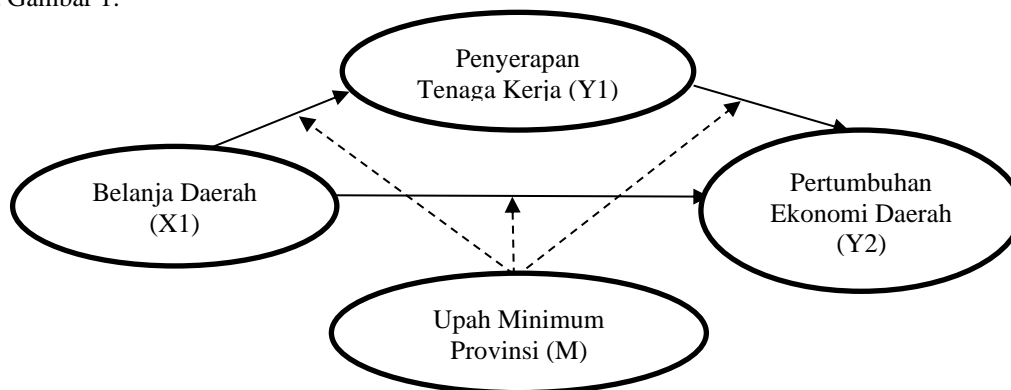
II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana model ilmiah didapatkan data yang valid yang bertujuan menemukan, menguji, menganalisis dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat memecahkan masalah pada bidang tertentu. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan eksploratif terkait pengaruh antar variabel. Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh hubungan sebab akibat apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja. Dengan variabel moderasi Upah Minimum Provinsi mampu mengetahui kemampuan variabel moderasi tersebut pada tingkat pengaruh yang ada terhadap masing-masing hubungan antar variabel yang tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi dengan 17 Provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan 16 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, namun dari sumber pihak lain yang didukung dengan beberapa konsep literatur teori dan studi empiris. Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari dokumen publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, publikasi BPS berupa Provinsi Dalam Angka 2010-2021.

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, dengan menelusuri terhadap berbagai data yang telah dipublikasi Badan Pusat Statistik nasional/provinsi berupa Buku Statistik Indonesia, publikasi BPS berupa Provinsi Dalam Angka 2009-2021, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>), simreg bappenas (<https://simreg.bappenas.go.id/>) serta dari kementerian, lembaga atau instansi yang terkait dengan penyediaan data yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur moderasi multigrup. Penelitian ini menggunakan satu variabel eksogen yaitu Belanja Daerah (X1), satu variabel endogen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y2), satu variabel mediasi yaitu variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) serta satu variabel moderasi yaitu Upah Minimum Provinsi (M). Diagram jalur untuk penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Jalur Penelitian

Hipotesis yang dirumuskan dalam kerangka konseptual di atas adalah sebagai berikut.

H_1 : Pengaruh Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

H_2 : Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

H_3 : Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

H_4 : Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja

H_5 : Pengaruh Upah Minimum dalam memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

H_6 : Pengaruh Upah Minimum dalam memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H_7 : Pengaruh Upah Minimum dalam memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

H_8 : Pengaruh Upah Minimum dalam memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan diagram pada Gambar 1, didapatkan model penelitian sebagai berikut.

$$Y_{1i} = \beta_{11}X_{1i} + \beta_{21}M_iX_{1i} + \varepsilon_{1i} \quad (1)$$

$$Y_{2i} = \beta_{12}X_{1i} + \beta_{22}M_iX_{1i} + \beta_{32}Y_{1i} + \beta_{42}M_iY_{1i} + \varepsilon_{2i} \quad (2)$$

Ketika $M_i = 0$, maka

$$Y_{1i} = \beta_{11}X_{1i} + \varepsilon_{1i} \quad (4)$$

$$Y_{2i} = \beta_{12}X_{1i} + \beta_{22}Y_{1i} + \varepsilon_{2i}$$

(5)

Ketika $M_i = 1$, maka

$$Y_{1i} = \beta_{11}X_{1i} + \beta_{21}X_{1i} + \varepsilon_{1i} \quad (6)$$

$$Y_{1i} = (\beta_{11} + \beta_{21})X_{1i} + \varepsilon_{1i} \quad (7)$$

$$Y_{2i} = (\beta_{12} + \beta_{22})X_{1i} + (\beta_{32} + \beta_{42})Y_{1i} + \varepsilon_{2i} \quad (8)$$

$$Y_{2i} = \beta_{12}X_{1i} + \beta_{22}X_{1i} + \beta_{32}Y_{1i} + \beta_{42}Y_{1i} + \varepsilon_{2i} \quad (9)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistika Deskriptif

Sebelum melakukan analisis jalur moderasi multigrup, maka perlu dilakukan analisis statistika deskriptif terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran umum mengenai Belanja Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan Upah Minimum Provinsi. Secara ringkas hasil analisis statistika deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Belanja Daerah	80,868	92,578	86,721	2,368
Penyerapan Tenaga kerja	12,665	16,910	14,504	0,996
Pertumbuhan Ekonomi daerah	30,338	35,147	32,522	1,169
Upah Minimum Provinsi	13,354	15,267	14,270	0,416

Berdasarkan Tabel 1. di atas, diketahui bahwa Belanja Daerah terendah sebesar 80,868 dan Belanja Daerah tertinggi menghabiskan sebesar 92,578. Belanja Daerah memiliki rata-rata sebesar 86,721 yang mempunyai arti bahwa sebagian besar Belanja Daerah menghabiskan sebesar 86,271. Kemudian diketahui

nilai standar deviasi sebesar 2,368 yang artinya persebaran data pada Belanja Daerah tidak begitu bervariasi (homogen), sehingga karakteristik data relatif sama.

Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja terendah sebesar 12,665 dan tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tertinggi sebesar 16,910. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja memiliki rata-rata sebesar 14,504 yang mempunyai arti bahwa sebagian besar tingkat Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 14,504. Kemudian diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,996 yang artinya persebaran data pada Penyerapan Tenaga Kerja tidak begitu bervariasi (homogen), sehingga karakteristik data relatif sama.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah terendah sebesar 30,338 dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tertinggi sebesar 35,147. Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki rata-rata sebesar 35,522 yang mempunyai arti bahwa sebagian besar Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebesar 35,522. Kemudian diketahui nilai standar deviasi sebesar 1,169 yang artinya persebaran data pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak begitu bervariasi (homogen), sehingga karakteristik data relatif sama.

Upah Minimum Provinsi terendah sebesar 13,354 dan Upah Minimum Provinsi tertinggi sebesar 15,267. Upah Minimum Provinsi memiliki rata-rata sebesar 14,270 yang mempunyai arti bahwa sebagian besar Upah Minimum Provinsi sebesar 14,270. Kemudian diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,416 yang artinya persebaran data pada Upah Minimum Provinsi tidak begitu bervariasi (homogen), sehingga karakteristik data relatif sama.

B. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antar lebih dari dua variabel. Pengujian linieritas pada penelitian ini menggunakan metode Ramsey *Regression Specification Error Test* (RESET) dengan bantuan *software* RStudio. Secara ringkas hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas

Variabel	<i>p-value</i>	Hubungan
X_1 dengan Y_1	0,2899	Linier
X_1 dengan Y_2	0,2557	Linier
Y_1 dengan Y_2	0,2291	Linier

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa hasil pengujian dengan Ramsey *Regression Specification Error Test* (RESET) menunjukkan hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen menghasilkan *p-value* $> \alpha(0,05)$ yang artinya menerima H_0 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel seluruhnya adalah linier sehingga memenuhi persyaratan analisis jalur.

C. Analisis Jalur Moderasi Multigrup

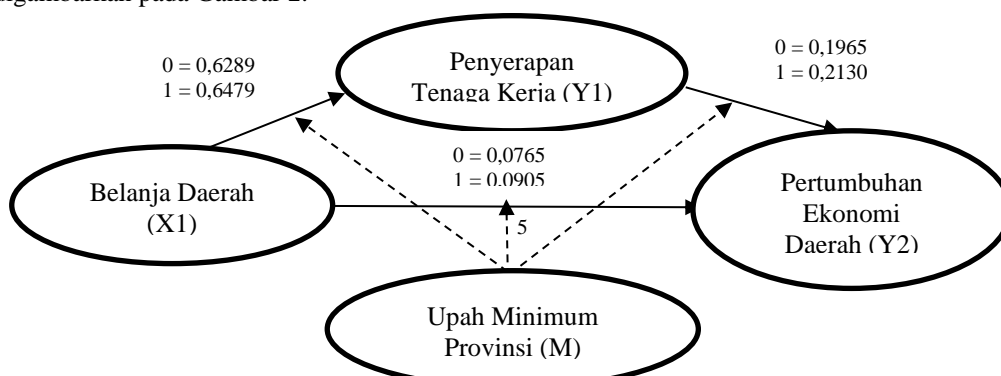
1) Pengujian Hipotesis Analisis Jalur

Pengujian hipotesis analisis jalur menggunakan uji t. Hasil pengujian hipotesis analisis jalur dapat diketahui pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Analisis Jalur

Grup	Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	<i>p-value</i>	Keterangan
Upah Minimum Provinsi Rendah	Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	0,6289	12,9938	0,0000	Signifikan
	Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,0765	1,8478	0,0646	Tidak Signifikan
	Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,1965	3,9300	0,0001	Signifikan
Upah Minimum Provinsi Tinggi	Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	0,6479	11,6739	0,0000	Signifikan
	Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,0905	2,2073	0,0273	Signifikan
	Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,2130	4,3737	0,0000	Signifikan

Berdasarkan koefisien jalur pada Tabel 3 akan membentuk jalur hubungan yang dapat digambarkan pada Gambar 2.



0: Grup Upah Minimum Provinsi Rendah
 1: Grup Upah Minimum Provinsi Tinggi

Gambar 2. Hasil Pengujian Hipotesis Analisis Jalur

Berdasarkan diagram tersebut, didapatkan model penelitian sebagai berikut.

Persamaan untuk grup satu variabel moderasi bernotasi 0

$$Y_{1i} = 0,6829X_{1i} + \varepsilon_{1i}$$

$$Y_{2i} = 0,0765X_{1i} + 0,1965Y_{1i} + \varepsilon_{2i}$$

Persamaan untuk grup dua variabel moderasi bernotasi 1

$$Y_{1i} = 0,6479X_{1i} + \varepsilon_{1i}$$

$$Y_{2i} = 0,0905X_{1i} + 0,213Y_{1i} + \varepsilon_{2i}$$

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, hubungan Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja adalah signifikan dengan koefisien sebesar 0,6289. Hal ini mengindikasikan bahwa pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, semakin tinggi Belanja Daerah, maka Penyerapan Tenaga Kerja di grup dengan Upah Minimum akan semakin meningkat. Terdapat hubungan yang signifikan pula antara Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan koefisien sebesar 0,1965. Hal ini mengindikasikan bahwa di grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja maka akan diikuti dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemudian pada hubungan antara Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah tidak signifikan dengan koefisien sebesar 0,0765. Hal ini mengindikasikan bahwa pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, Belanja Daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi, hubungan Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja adalah signifikan dengan koefisien sebesar 0,6479. Hal ini mengindikasikan bahwa pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi, semakin tinggi Belanja Daerah, maka Penyerapan Tenaga Kerja di grup dengan Upah Minimum Provinsi akan semakin meningkat. Terdapat hubungan yang signifikan pula antara Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan koefisien sebesar 0,0905. Hal ini mengindikasikan bahwa di grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi, semakin tinggi Belanja Daerah, maka semakin meningkat pula Pertumbuhan Ekonominya. Kemudian pada hubungan antara Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi adalah signifikan dengan koefisien sebesar 0,2130. Hal ini mengindikasikan bahwa pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi, semakin tinggi Penyerapan Tenaga Kerja, maka semakin meningkat pula Pertumbuhan Ekonomi Daerahnya.

2) Uji Kesejajaran Koefisien Regresi pada Dua Grup (Pengaruh Langsung)

Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui peran variabel moderasi Upah Minimum Provinsi terhadap hubungan antar variabel pada model dan didapatkan hasil yang dapat diketahui pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Uji Kesejajaran Regresi pada dua Grup (Pengaruh Langsung)

Hubungan Pengaruh Langsung	Grup: Upah Minimum Provinsi Rendah		Grup: Upah Minimum Provinsi Tinggi		Kesimpulan
	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	
Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	0,6289	0,0000	0,6479	0,0000	Moderasi Memperkuat
Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,0765	0,0646	0,0905	0,0273	Bukan Pemoderasi
Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,1965	0,0001	0,2130	0,0000	Moderasi Memperkuat

Berdasarkan hasil uji kesejajaran koefisien regresi terhadap dua grup pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa variabel Upah Minimum Provinsi merupakan variabel moderasi hubungan Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Hal tersebut diketahui berdasarkan koefisien jalur pada dua grup

signifikan dan p -value lebih kecil dibandingkan nilai α yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada hubungan Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja apabila diterapkan pada grup yang berbeda akan mendapatkan pengaruh yang berbeda pula. Berdasarkan nilai koefisien jalur pada masing-masing grup yang diuji, didapatkan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa efek variabel moderasi tersebut lebih kuat (nyata) pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi.

Kemudian dapat diketahui bahwa variabel Upah Minimum Provinsi bukan merupakan variabel moderasi hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hal ini diketahui berdasarkan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pada hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah apabila diterapkan pada grup yang berbeda akan memberikan pengaruh yang sama.

Variabel Upah Minimum Provinsi merupakan variabel moderasi hubungan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hal tersebut diketahui berdasarkan koefisien jalur pada dua grup signifikan dan p -value lebih kecil dibandingkan nilai α yang digunakan, sehingga dikatakan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi merupakan variabel moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila hubungan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah diterapkan pada grup yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda pada masing-masing grup. Berdasarkan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, maka dapat dikatakan bahwa efek variabel moderasi Upah Minimum Provinsi tersebut lebih kuat (nyata) pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi.

3) Uji Kesejajaran Koefisien Regresi pada Dua Grup (Pengaruh Tidak Langsung)

Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk mengetahui peran variabel moderasi Upah Minimum Provinsi terhadap hubungan antar variabel pada model secara tidak langsung dan didapatkan hasil yang dapat diketahui pada Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Uji Kesejajaran Regresi pada dua Grup (Pengaruh Tidak Langsung)

Hubungan Pengaruh Tidak Langsung	Grup: Upah Minimum Provinsi Rendah		Grup: Upah Minimum Provinsi Tinggi		Kesimpulan
	Koefisien	p -value	Koefisien	p -value	
Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja	0,1236	0,0002	0,1380	0,0000	Moderasi Memperkuat

Berdasarkan hasil uji kesejajaran koefisien regresi terhadap dua grup pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa variabel Upah Minimum Provinsi merupakan variabel moderasi hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja. Hal tersebut diketahui berdasarkan koefisien jalur pada dua grup signifikan dan p -value lebih kecil dibandingkan nilai α yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja apabila diterapkan pada grup yang berbeda akan mendapatkan pengaruh yang berbeda pula. Berdasarkan nilai koefisien jalur pada masing-masing grup yang diuji, didapatkan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien jalur pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa efek variabel moderasi tersebut lebih kuat (nyata) pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi.

4) Pemeriksaan Validitas Model

Pemeriksaan validitas model diperlukan untuk mengetahui model yang diperoleh sudah valid sehingga dapat mempresentasikan hubungan dari masing-masing variabel. Pemeriksaan validitas model dapat dilihat dari nilai R Squared dengan bantuan *software* RStudio. Berdasarkan *output* RStudio diperoleh R Squared sebesar 0,84, maka model yang terbentuk termasuk model yang baik dalam menjelaskan keragaman data yang terdapat di dalam model. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel Belanja Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja mampu menjelaskan keragaman variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebesar 84%, lalu sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah dan grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi. Kemudian, Penyerapan Tenaga Kerja juga berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada kedua grup. Lalu pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Rendah, Belanja Daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah sedangkan pada grup dengan Upah Minimum Provinsi Tinggi berpengaruh signifikan. Upah Minimum Provinsi dapat memperkuat hubungan antara variabel Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja. Artinya peningkatan atau penurunan Upah Minimum Provinsi dapat memperkuat hubungan variabel-variabel tersebut. Namun, Upah Minimum Provinsi tidak dapat memoderasi hubungan antar variabel Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, maka pemerintah harus berfokus pada peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja. Selain itu, untuk peningkatan Belanja Daerah juga dapat menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, tetapi peningkatan dari Belanja Daerah tersebut harus diikuti dengan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

Berdasarkan penelitian ini saran untuk pemerintah diharapkan mengalokasikan Belanja Daerah ke sektor-sektor produktif sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Selain itu, dapat menerapkan kebijakan mengenai pengalokasian Belanja Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja yang merata di seluruh wilayah agar upah minimum masing-masing wilayah juga merata dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga diharapkan fokus terhadap pengembangan angkatan kerja agar dapat diserap dengan baik. Kepada peneliti diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis moderasi multigrup pada analisis jalur untuk kasus lebih dari dua grup dengan mempertimbangkan karakteristik grup lain. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan analisis jalur untuk kasus lebih dari satu variabel eksogen.

TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kenikmatan baik iman, kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan penyusunan makalah ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Adji Achmad Rinaldo F., S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing, di sela-sela kesibukannya, tetap meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan arahan, dorongan dan saran, hingga diselesaikannya penulisan dari makalah ini. Ucapan terima kasih juga selalu kami sampaikan kepada kakak-kakak KKUPSSD khususnya Kak Adfi dan Kak Arin yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan makalah ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan mengharapkan adanya kritik dan saran agar makalah ini menjadi lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta informasi bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96. <https://doi.org/10.22146/jgs.34054>
- [2] Douma, J. C., & Shipley, B. (2021). A multigroup extension to piecewise path analysis. *Ecosphere*, 12(5). <https://doi.org/10.1002/ecs2.3502>
- [3] Mohanty, R. K., & Bhanumurthy, N. R. (2021). Assessing public expenditure efficiency at the subnational level in India: Does governance matter? *Journal of Public Affairs*, 21(2), 1–14. <https://doi.org/10.1002/pa.2173>
- [4] Hanita, Y., & Sentosa, S. U. (2022). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Pengaruh Investasi Asing dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kesempatan Kerja Industri Besar Di Indonesia : dengan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi*. 4, 45–52.
- [5] Alisman, A. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(2), 321–333. <https://doi.org/10.31002/rep.v3i2.1040>
- [6] Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment to the Economic Growth of Primary Sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 1692–1703. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1101>
- [7] Suryanto, T., & Siregar, R. E. W. (2020). Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Pengolahan. *Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–18.
- [8] Intan, M., & Safrianto, Y. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(2), 113–124.
- [9] Safitri, J. (2022). Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pulau Jawa 2016-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(2), 259–267.
- [10] Mudiarcana, G. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(6), 1112-1139.

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2023
Prosiding Pendidikan Matematika, Matematika, dan Statistika Volume 7 (2023)
e-ISSN No. 2721-6802

- [11] Chodariyanti, L. (2016). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekbis*, 15(1), 12. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v15i1.16>
- [12] Fölster, S., & Henrekson, M. (2001). Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. *European Economic Review*, 45(8), 1501–1520. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(00\)00083-0](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00083-0)
- [13] Hidayati, N. (2022). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, April.
- [14] Resesi, M., & Global, E. (2023). 3 1,2,3. 2(4), 1657–1668.
- [15] Yanti, I., Darmanto, Solimun, Nurjannah, Astuti, A. B., Rinaldo Fernandes, A. A., Amaliana, L., & Isaskar, R. (2019). Modeling of Multigroup Based Structural Equations with Path Analysis Approach (Application in Green Marketing Strategy in Traditional and Modern Food in Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 239(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/239/1/012020>
- [16] Yildirim, J., Sezgin, S., & Öcal, N. (2005). Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis. *Defence and Peace Economics*, 16(4), 283–295. <https://doi.org/10.1080/10242690500114751>